

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada tanggal 30 Mei 2024, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Kebijakan ini, merupakan revisi atas PP nomor 96 Tahun 2021, yang sontak menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia. Sebuah tajuk berita di media daring bahkan membingkai peristiwa ini dengan tajam: *“NU-Muhammadiyah: Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang”*.¹ Frasa ini lebih dari sekedar judul; ia menangkap potret fenomena sosial-politik yang kompleks, dimana dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nadhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kini dihadapkan pada tantangan ekstraktivisme yang sama. Dalam konteks penelitian ini, ekstraktivisme tidak sekedar sebagai aktivitas pertambangan, melainkan sebuah pola ekonomi pengambilan sumber daya alam secara masif yang menuntut respons ideologis mendalam dari sebuah organisasi keagamaan.

Respon yang beragam dari masyarakat Indonesia menggarisbawahi sensitivitas isu ini. Di satu sisi, Pengurus Besar (PB) NU secara terbuka menyambut baik kebijakan tersebut dan membingkainya sebagai kesempatan untuk memberdayakan umat dan organisasi. Di sisi lain, Pimpinan Pusat (PP)

¹ Agus Sutisna, ‘NU-Muhammadiyah: Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang’, *Indonesiana*, 8 January 2024. Di akses pada 15 Oktober 2025.

Muhammadiyah, meskipun tidak secara eksplisit menolak, mengambil sikap yang jauh lebih hati-hati, menyatakan perlunya pengkajian mendalam dari berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.² Meskipun demikian, setelah proses kajian internal yang mendalam, pada akhirnya Muhammadiyah pun memutuskan untuk turut mengambil kesempatan ini. Perbedaan respons awal ini memicu diskursus panas di ruang publik, yang menjadikan peristiwa ini bukan lagi sekadar isu kebijakan sektoral, melainkan sebuah krisis komunikasi organisasi yang nyata. NU dan Muhammadiyah kini menghadapi tantangan legitimasi yang serius di mata publik karena munculnya benturan tajam antara *branding* “*Green Islam*” yang telah mereka bangun selama puluhan tahun dengan keputusan politik-ekonomi untuk menerima konsensi ekstraktivisme tersebut.

Situasi ini menjadi semakin problematis mengingat *image* industri ekstraktivisme di Indonesia yang sarat dengan rekam jejak negatif. Data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) secara konsisten melaporkan dampak destruktif industri ekstraktif, mulai dari deforestasi masif, pencemaran air dan tanah, hingga perampasan ruang hidup masyarakat adat dan konflik sosial yang berkepanjangan.³ Keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor yang secara inheren berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia ini menimbulkan pertanyaan

² Said Romadlan et al., ‘Diskursus Pemberitaan Media Online mengenai Penerimaan Izin Usaha Pertambangan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’, *Communications* 7 (July 2025): 2, <https://doi.org/10.21009.coms7.2.3>.

³ Ridwan Nanda Mulyana, ‘70% Lahan Kalsel dikuasai industri ekstraktif, Jatam dan Walhi minta evaluasi izin - Page 3’, *Nasional.Kontan.co.id*, 21 January 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/70-lahan-kalsel-dikuasai-industri-ekstraktif-jatam-dan-walhi-minta-evaluasi-izin?page=3>.

fundamental: bagaimana organisasi yang selama ini memposisikan diri sebagai penjaga moral dan pilar masyarakat sipil dapat menavigasi peran barunya sebagai pelaku industri ekstraktif? Tantangan ini menuntut organisasi untuk mengelola komunikasi mereka secara sangat hati-hati demi mempertahankan legitimasi di hadapan konstituen yang semakin kritis.

Pertanyaan ini menjadi semakin tajam ketika ditempatkan dalam konteks gerakan *Green Islam* yang justru telah lama dirintis oleh kedua organisasi ini. Secara historis, baik NU maupun Muhammadiyah adalah pionir dalam artikulasi wacana dan praktik Islam lingkungan di Indonesia. Selama beberapa dekade, keduanya telah melahirkan inisiatif substansial untuk merespons krisis ekologis global dan lokal. Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Lingkungan Hidup, telah menerbitkan produk-produk pemikiran seperti “Fikih Air”, “Fikih Kebencanaan”, hingga “Fikih Transisi Energi Berkeadilan”, yang secara eksplisit mendorong model pembangunan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan secara ekologis. Komitmen ini ditegaskan kembali dalam Mukhtamar ke-48 tahun 2022 yang mendorong ekonomi berkeadilan sosial tanpa merusak lingkungan.⁴ Ini menunjukkan komitmen teologis yang kuat terhadap aspek konservasi yang kini nampak bertabrakan dengan logika ekstraktivisme masif.

Serupa dengan itu, NU melalui forum Bahtsul Masail secara historis telah mengeluarkan berbagai fatwa progresif terkait isu lingkungan, dari hukum pembalakan liar hingga keharaman membuang sampah sembarangan, serta mendorong adanya regulasi perubahan iklim dalam Mukhtamar ke-34 tahun

⁴ ‘Tanfidz Mukhtamar Ke 48 Muhammadiyah Di Solo’, n.d.

2021.⁵ Gerakan-gerakan ini bukan sekadar retorika, melainkan telah melembaga dan menjadi bagian krusial dari identitas keislaman kedua ormas. Kebijakan konsesi tambang ini menciptakan sebuah benturan epistemologis dan etis yang signifikan. Tawaran WIUPK secara langsung menantang prinsip-prinsip inti *Green Islam* yang diusung keduanya, seperti konsep *khalifah fil ardh* (mandat pengelolaan bumi yang bertanggung jawab), larangan berbuat kerusakan (*fasad*), dan etika pemeliharaan keseimbangan alam (*mizan*). Posisi baru sebagai calon pengelola tambang menempatkan NU dan Muhammadiyah dalam ambiguitas peran. Akankah mereka tetap menjadi pengkritik etis dari luar sistem industri ekstraktif, ataukah mereka akan menjadi bagian dari sistem ekstraktivisme itu sendiri, dengan segala risiko kompromi nilai yang menyertainya?

Kontradiksi inilah yang menjadi jantung permasalahan dalam penelitian ini. Dimana krisis komunikasi organisasi muncul akibat ketegangan antara nilai ideal dan praktik pragmatis. Posisi dilematis ini mengharuskan kedua organisasi untuk mengkomunikasikan dan melegitimasi sikap mereka kepada publik melalui corong media resmi masing-masing. Portal resmi *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id* bertransformasi menjadi arena diskursif krusial dimana identitas kelembagaan dinegosiasikan, dipertahankan, atau bahkan dikonstruksi ulang. Analisis terhadap pemberitaan kedua media daring ini menjadi penting untuk melihat bagaimana mekanisme komunikasi organisasi bekerja, apakah wacana yang mereka bangun akan merefleksikan dan mempertahankan rekam jejak kritis *Green Islam*, ataukah

⁵ Asep Firmansyah, *Muktamar Ke-34 NU dorong pemerintah buat UU Perubahan Iklim* - ANTARA News, 24 December 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2604165/muktamar-ke-34-nu-dorong-pemerintah-buat-uu-perubahan-iklim>.

mereka akan mulai merasionalisasi dan membangun wacana baru yang melegitimasi keterlibatan dalam industri ekstraktivisme atas nama pragmatisme, kemaslahatan umat, atau narasi pembangunan nasional?

Ketegangan internal kedua ormas ini tidak terjadi di ruang hampa. Keduanya berada tepat di tengah pusaran kebijakan startegis nasional yang paling ambisius saat ini, yakni Hilirisasi Nikel. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo secara agresif mempromosikan hilirisasi sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi, dan pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global.⁶ Narasi yang dibangun oleh negara sangatlah kuat, ini adalah kepentingan nasional, kemajuan teknologi, dan masa depan energi bersih. Namun, narasi makro ini seringkali membungkam suara-suara di level mikro. Data dari JATAM dan WALHI secara konsisten melaporkan bahwa di balik proyek-proyek strategis ini, terjadi peningkatan deforestasi, pencemaran laut, dan perampasan ruang hidup masyarakat adat dan nelayan di Sulawesi, Maluku Utara, hingga Raja Ampat. Sedangkan, pada tahun 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 86 yang spesifik mengharamkan segala aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan secara nyata.⁷ Hal ini memberikan landasan teologis yang kuat bagi penolakan publik sekaligus memperberat beban komunikasi organisasi NU dan Muhammadiyah.

⁶ Intan Pratiwi, *Indonesia Juara Satu Ekspansi Tambang Batu Bara di Asia Tenggara* | *Republika Online*, 8 April 2025, <https://esgnow.republika.co.id/berita/t0gfkx522/indonesia-juara-satu-ekspansi-tambang-batu-bara-di-asia-tenggara>.

⁷ M. Faiz Zaki, *MUI Kaji Dampak Lingkungan Sebelum Terima Izin Tambang Ormas dari Pemerintah* | *tempo.co*, 26 June 2024, <https://www.tempo.co/politik/mui-kaji-dampak-lingkungan-sebelum-terima-izin-tambang-ormas-dari-pemerintah-36378>.

Kebijakan konsesi tambang kepada ormas ini semakin kontroversial karena terjadi ditengah eskalasi konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang akut di wilayah pertambangan. Laporan dari JATAM secara eksplisit menyoroti pola ekstraktivisme nikel telah memicu pertarungan kuasa antar korporasi yang berimplikasi langsung pada hak-hak masyarakat, khususnya di wilayah seperti Halmahera.⁸ Lebih jauh, WALHI tegas menyatakan bahwa memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan merupakan “masalah besar, bukan masalah besar”, karena potensi kerusakan ekologis yang bersifat permanen jauh melampaui manfaat finansial jangka pendek yang dijanjikan.⁹ Pandangan-pandangan kritis ini membentuk arena diskursif yang sangat menantang bagi NU dan Muhammadiyah, menuntut kejelasan posisi moral dalam komunikasi organisasi mereka agar tidak kehilangan kepercayaan dari basis massa mereka sendiri.

Dilema etis ini menjadi semakin konkret ketika dikaitkan dengan isu ekstraktivisme nikel di wilayah krusial seperti Raja Ampat, Papua Barat. Kawasan yang diakui sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia ini menghadapi ancaman serius dari industri ekstraktif. Laporan media menyoroti reaksi keras dari pelaku wisata terhadap potensi penambangan nikel karena mengancam mata pencaharian dan keindahan alam¹⁰, serta menegaskan bahwa kerusakan di wilayah

⁸ JATAM, ‘Nikel dari Tanah Terampas: Kriminalisasi Warga dan Pertarungan Kuasa Antar-Korporasi di Halmahera’, *Jatam.org*, 10 November 2025, <https://jatam.org/id/lengkap/Nikel-dan-Pertarungan-Kuasa-Antar-Korporasi-di-Halmahera>. Diakses 1 desember 2025

⁹ Parid Ridwanuddin, ‘Izin Tambang untuk Ormas, Masalah Besar bukan Masalah Besar’, *WALHI.or.id*, 4 July 2024, <https://www.walhi.or.id/izin-tambang-untuk-ormas-masalah-besar-bukan-masalah-besar>. Diakses 1 desember 2025

¹⁰ Olha Mulalinda, *Reaksi Pelaku Wisata atas Penambangan di Raja Ampat*, sect. 09/06/2025, (tempo.co), n.d., <https://www.tempo.co/politik/reaksi-pelaku-wisata-atas-penambangan-di-raja-ampat-1673659>. diakses pada 1 desember 2025.

tersebut adalah kerusakan yang tidak akan pulih.¹¹ Masyarakat adat, yang diwakili oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), juga menolak tegas upaya penambangan yang merusak ruang hidup mereka, mendasarkan penolakan pada hak-hak tradisional.¹² Tuntutan keadilan ekologis ini menciptakan tekanan publik yang luar biasa terhadap NU dan Muhammadiyah, memaksa mereka untuk merespons dan melegitimasi pilihan mereka dalam konteks kerusakan lingkungan yang nyata melalui portal resmi organisasi.

Kritik terhadap ormas keagamaan yang terjun ke bisnis ekstraktif ini memperkuat dilematis etis yang dihadapi. Aktivis lingkungan menyerukan agar ormas keagamaan tidak berbisnis tambang dan mendesak agar organisasi seperti NU dan Muhammadiyah diselamatkan dari keterlibatan dalam energi kotor seperti batubara, demi menjaga integritas moral organisasi tersebut sebagai penjaga etika sosial.¹³ Kontradiksi ini semakin tajam ketika ormas keagamaan lain, seperti Nahdhatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), juga mulai menyatakan minatnya terhadap konsesi tambang, yang dilihat sebagai pergeseran peran ormas dari pengawasan masyarakat sipil (*civil society watchdog*) menjadi aktor yang selaras dengan kepentingan negara (*state aligned actors*).¹⁴ Pergeseran peran ini dapat berimplikasi pada hilangnya suara kritis dalam kebijakan publik.

¹¹A. Asnawi and Riza Salman, 'Tambang Nikel Raja Ampat, Kerusakan Tak Bakal Pulih', *Mongabay.Co.Id*, 8 June 2025, <https://mongabay.co.id/2025/06/08/tambang-nikel-raja-ampat-kerusakan-tak-bakal-pulih/>. Diakses pada 1 desember 2025.

¹² Samuel Moifilit, *Raja Ampat Papua Terancam Dieksploitasi Perusahaan Tambang*, 13 March 2025, <https://www.aman.or.id/news/read/2037>. Diakses 1 desember 2025.

¹³ Firdaus Cahyadi, 'Selamatkan Nahdhatul Ulama Dari Pusaran Energi Kotor Batubara', *Mongabay.Co.Id*, 5 June 2025, <https://mongabay.co.id/2024/06/05/selamatkan-nahdhatul-ulama-dari-pusaran-energi-kotor-batubara/>. Diakses pada 1 desember 2025.

¹⁴ The Jakarta Post, 'Another Muslim Group Declares Interest in Mining Concessions', *Thejakartapost.Com*, August 2024,

Keputusan ormas untuk menerima konsensi, meskipun menghadapi kritik keras, sering kali dilandasi pada interpretasi konsep *masalah mursalah* (kemaslahatan umum). Argumen yang digunakan adalah bahwa keuntungan dari tambang akan menopang jaringan amal, pendidikan, dan kesehatan. Namun, tindakan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks politik pasca pemilu yang melihat tawaran WIUPK sebagai *political reward* atau upaya konsolidasi dukungan elite. Dengan terlibat dalam sektor tambang, media resmi kedua ormas bertugas tidak hanya untuk mengkomunikasikan posisi teologis-pragmatis mereka (argumen masalah), tetapi juga untuk menjustifikasi posisi politik kelembagaan mereka di hadapan konsituen. Hal ini semakin menunjukkan bahwa wacana yang dibangun media ormas merupakan arena negosiasi ideologi yang kompleks antara etika ideal dan realitas politik.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa dalam bidang Komunikasi lingkungan, studi pemberitaan media tentang isu tambang oleh para peneliti seperti Romadlan, dkk. sangat baik dalam memetakan diskursus pro dan kontra di media *mainstream* seperti *Detik.com*, *Kompas.com*, dan *Tempo.com*. Namun, terdapat dua kesenjangan krusial. Pertama, objek mereka adalah media *mainstream* yang berfungsi sebagai pengamat eksternal.¹⁵ Belum ada penelitian yang fokus pada portal resmi milik ormas itu sendiri (*Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id*), yang berfungsi sebagai representasi suara dan ideologi kelembagaan secara langsung. Kedua, metode yang digunakan (analisis wacana Halliday-Hasan atau analisis isi kualitatif)

<https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/08/02/another-muslim-group-declares-interest-in-mining-concessions.html>. Diakses pada 1 desember 2025.

¹⁵ Romadlan et al., 'Diskursus Pemberitaan Media Online mengenai Penerimaan Izin Usaha Pertambangan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'.

mampu memetakan “siapa berkata apa”, namun kurang diperlengkapi untuk mengungkapkan relasi kuasa dan ideologi yang tersembunyi di balik teks.

Penelitian oleh Rosadha, dkk, juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa media arus utama di Indonesia masih cenderung menampilkan isu lingkungan secara teknokratis dan depolitisasi, dimana narasi dominan berasal dari aktor negara dan korporasi, sementara suara masyarakat terdampak seringkali diabaikan. Penelitian tersebut, yang menggunakan model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, menyoroti bagaimana media justru mereproduksi wacana hegemonik dan mengabaikan dimensi keadilan ekologis.¹⁶ Hal ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih kritis dan partisipatif untuk memahami bagaimana isu lingkungan dikonstruksikan dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. Studi tentang Islam dan lingkungan di Indonesia memang sangat kaya, namun cenderung bersifat normatif-teologis. Mereka sangat baik dalam menjelaskan apa yang seharusnya diajarkan Islam tentang lingkungan, tetapi masih kurang dalam menganalisis bagaimana idealisme tersebut berbenturan, dinegosiasikan, atau bahkan dikompromikan dalam praktik komunikasi konkret ketika dihadapkan pada kebijakan negara yang dilematis dan pragmatisme politik. Terakhir, aplikasi Analisis Wacana Kritis (AWK) di Indonesia sudah banyak, tetapi belum ada yang menggunakannya untuk melakukan analisis komparatif secara langsung terhadap bagaimana dua entitas masyarakat sipil terbesar dengan basis ideologi yang berbeda merespons sebuah kebijakan negara yang sama. Terlebih lagi, penelitian oleh

¹⁶ Sefira Amelia Rosadha et al., *Representasi Isu Lingkungan dalam Media Arus Utama Indonesia: Sebuah Analisis Wacana Kritis*, n.d.

Romadlan, dkk. Secara eksplisit merekomendasikan penggunaan model AWK yang lebih komprehensif seperti Teun A. Van Dijk untuk penelitian selanjutnya, guna mengkaji keterkaitan antara diskursus dengan relasi kekuasaan, ideologi, dan kepentingan ekonomi-politik.¹⁷

Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan kerangka analisis yang mampu melampaui sekadar deskripsi teks, melainkan mengungkapkan produksi diskursif dari dilematis etis politik ini. Model Analisis Wacana (AWK) Teun A. Van Dijk sangat relevan, karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji tiga dimensi secara simultan: Teks (Bagaimana kata, frasa, dan metafora digunakan), kognisi sosial (ideologi yang mendasari keputusan), dan konteks sosial (struktur kekuasaan politik-ekonomi yang melingkupi).¹⁸ Pendekatan komparatif AWK ini, yang belum pernah diterapkan pada dua media ormas ini secara bersamaan dalam isu kebijakan negara, akan secara efektif membedah bagaimana ideologi *Green Islam* dikompromikan atau dipertahankan dalam narasi resmi mereka, sekaligus mengungkap mekanisme legitimasi wacana.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini sangat jelas. Di tengah kontestasi narasi antara “berkah ekonomi” versi negara dan “kutukan ekologi” versi masyarakat sipil, posisi diskursif NU dan Muhammadiyah melalui media resmi mereka menjadi krusial. Menganalisis bagaimana *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id* mengkonstruksi isu konsesi tambang pasca PP 25/2024 tidak hanya akan mengisi kekosongan akademis, tetapi juga menjelaskan kompleksitas

¹⁷ Romadlan et al., ‘Diskursus Pemberitaan Media Online mengenai Penerimaan Izin Usaha Pertambangan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’.

¹⁸ Teun A. Van Dijk, *Critical Discourse Analysis* (John Wiley & Sons, Inc., 2015).

negosiasi identitas, nilai, dan kekuasaan dalam representasi suara Islam di ruang publik Indonesia kontemporer. Untuk membedah fenomena ini secara sistematis, penelitian ini akan fokus pada tiga dimensi analisis wacana kritis, yaitu: (1) mengidentifikasi konstruksi teks mengenai isu konsesi tambang pada level mikro, (2) menganalisis kognisi sosial yang melatarbelakangi produksi wacana tersebut pada level mezo, dan (3) mengidentifikasi relasi kuasa serta konteks sosial-politik yang direpresentasikan oleh kedua organisasi dalam merespons narasi pembangunan nasional pada level makro.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini berfokus pada persoalan utama yang muncul dari perbedaan sikap dan konstruksi wacana antara NU dan Muhammadiyah terkait isu keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan WIUPK pasca PP No. 25 Tahun 2024. Oleh karena itu, rumusan masalah disusun sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana dimensi struktur teks mengenai isu ekstraktivisme dikonstruksikan secara diskursif oleh portal *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id*?
- 1.2.2. Bagaimana dimensi kognisi sosial organisasi merefleksikan negosiasi ideologi *Green Islam* dalam produksi wacana ekstraktivisme pada Portal *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id*?
- 1.2.3. Bagaimana dimensi konteks sosial dalam portal *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id* merefleksikan strategi komunikasi organisasi dalam

menjaga legitimasi institusional serta memosisikan peran ormas di tengah relasi kuasa kebijakan ekstraktif negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan arah dan hasil yang ingin dicapai, khususnya dalam memahami bagaimana portal organisasi mengkonstruksi wacana lingkungan dan posisi ideologi kedua organisasi Islam tersebut, diantaranya:

- 1.3.1. Menganalisis bagaimana isu ekstraktivisme dikonstruksikan secara diskursif melalui struktur teks pada level leksikon, sintaksis dan retorika pada portal *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id*
- 1.3.2. Mengidentifikasi dan Menguraikan bagaimana NU dan Muhammadiyah melakukan negosiasi ideologi *Green Islam* dalam proses produksi wacana ekstraktivisme, yang termuat dalam wacana *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id*.
- 1.3.3. Menjelaskan strategi komunikasi NU dan Muhammadiyah dalam menjaga legitimasi institusional dan memetakan peran organisasi dalam relasi kuasa dan negara berdasarkan wacana yang diproduksi oleh *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai konstruksi wacana isu ekstraktivisme oleh media *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id* ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Adapun kedua manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

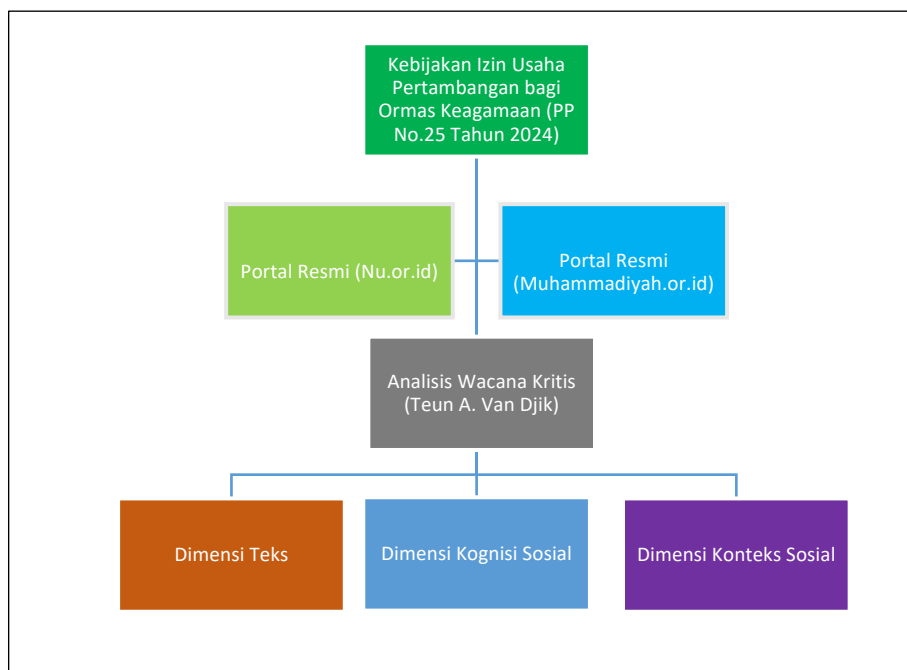
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi organisasi Islam di Indonesia, khususnya yang berfokus pada bagaimana media keagamaan mengkonstruksi dan menegosiasikan isu-isu lingkungan khususnya isu ekstraktif yang dilematis. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun A. Van Dijk dalam konteks media Islam, sehingga dapat memperluas cakupan pemahaman tentang relasi antara wacana, ideologi, kekuasaan, dan negosiasi identitas dalam praktik komunikasi keagamaan kontemporer.

1.4.2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan refleksi kritis bagi NU dan Muhammadiyah dalam memperkuat praktik jurnalisme lingkungan yang etis, berkeadilan ekologis, dan konsisten dengan nilai-nilai keislaman serta rekam jejak *branding Green Islam*. Selain itu, menjadi referensi bagi aktivis lingkungan, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana media keagamaan membentuk persepsi publik dan memposisikan diri terhadap isu tambang dan pembangunan

sosial, dan konteks sosial. Pada dimensi teks, analisis diarahkan untuk mengungkap bagaimana struktur wacana dibangun melalui pemilihan kata, penekanan tema, dan strategi retorik yang digunakan oleh *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id* dalam mengemas isu tambang nikel. Pilihan diksi seperti “kemaslahatan umat”, “pemberdayaan ekonomi”, atau “kerusakan lingkungan” tidak bersifat netral, tetapi mencerminkan kepentingan ideologis tertentu. Pada dimensi kognisi sosial, peneliti menelusuri bagaimana nilai-nilai, dan pandangan dunia (*worldview*) redaksi dan lembaga yang termanifestasi atau meninggalkan jejak-jejak tekstual di dalam teks berita. Kognisi sosial ini berperan penting karena setiap media membawa identitas ideologis yang khas, baik yang berakar pada tradisi keagamaan NU maupun pada rasionalitas modern Islam Muhammadiyah.

Sementara itu, pada dimensi konteks sosial, penelitian ini berupaya memetakan bagaimana wacana yang dibangun kedua media tersebut berhubungan dengan struktur sosial-politik dan ekonomi nasional, terutama dalam kebijakan hilirisasi nikel yang digagas oleh pemerintah. Relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam proses pembentukan wacana. Negara melalui narasi “kemandirian ekonomi” dan “energi bersih” berusaha melegitimasi praktik ekstraktivisme sebagai simbol kemajuan. Sedangkan masyarakat sipil, termasuk ormas keagamaan, berada dalam posisi dilematis antara mendukung pembangunan nasional atau mempertahankan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, konteks sosial menjadi ruang di mana wacana religius, politik, dan ekonomi berkelindan serta saling memengaruhi, membentuk konstruksi makna yang tidak tunggal, tetapi penuh negosiasi dan kompromi.



Gambar 1. 1 Landasan Pemikiran

Dari sinilah, penelitian ini menempatkan komunikasi keagamaan sebagai arena wacana yang mempertemukan kepentingan ideologis, politik, dan moral dalam satu ruang media. Portal berita *Nu.or.id* dan *Muhammadiyah.or.id* berfungsi bukan hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi dan representasi ideologis lembaga. Melalui pendekatan Van Dijk, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana kekuasaan, nilai, dan pengetahuan bekerja dalam teks media, serta bagaimana konstruksi wacana tersebut merefleksikan strategi masing-masing ormas dalam merespons kebijakan negara. Dengan kata lain, kerangka pemikiran ini memungkinkan penelitian untuk melihat wacana bukan hanya sebagai produk bahasa, tetapi juga sebagai manifestasi dari struktur sosial, kesadaran kolektif, dan politik representasi Islam dalam ruang publik kontemporer.